

ASPIRASI **kita**



EDISI 8-AGUSTUS 2025



FRAKSI PKS DPRD JATIM DORONG PERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG LEBIH KUAT

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menegaskan dukungannya terhadap upaya Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pandangan Umum tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (11/8/2025).

Harisandi menilai, lahirnya Raperda ini menjadi langkah strategis di tengah kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA menunjukkan sepanjang Januari–November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, mayoritas dialami anak perempuan. Sementara kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975 kasus pada 2023.



“

Ketahanan keluarga adalah fondasi pembangunan. Fraksi PKS mendorong sinergi kebijakan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pesantren, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, baik dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan di dunia digital seperti cyberbullying,” tegas Harisandi.

Di Jawa Timur sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Berdasarkan data SIMFONI PPA, tercatat 901 kasus pada 2021, meningkat menjadi 972 kasus pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 771 kasus pada 2024. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, disusul kekerasan psikis dan seksual.

Fraksi PKS menilai, regulasi daerah yang ada saat ini, yakni Perda No.16 Tahun 2012 dan Perda No.2 Tahun 2014, sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun kompleksitas masalah di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan satu Perda baru yang menggabungkan perlindungan perempuan dan anak agar lebih komprehensif, efisien, dan efektif.

“Perda baru ini nantinya bukan hanya menangani kasus ketika kekerasan sudah terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan. Ini penting, termasuk di lingkungan pendidikan dan pesantren yang juga rawan terjadi kekerasan,” ujar Harisandi.

Ia menambahkan, keberadaan Perda baru akan menjadi payung hukum yang lebih kokoh di tingkat daerah, sejalan dengan berbagai regulasi nasional seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan teknis pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

“Perempuan adalah tiang negara. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Melindungi perempuan dan anak berarti menjaga masa depan bangsa,” tutup Harisandi.

APRESIASI FRAKSI PKS SELALU HADIR LENGKAP, KETUA PKS JATIM: BUKTI MILITANSI DAN KOMITMEN UNTUK RAKYAT

Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bagus Prasetia Lelana, memberikan apresiasi tinggi kepada Fraksi PKS DPRD Jatim yang konsisten menghadirkan seluruh anggotanya secara lengkap dalam setiap sidang paripurna. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Ruang Fraksi PKS DPRD Jatim pada Jumat (15/8/2025), di sela-sela kehadirannya mengikuti sidang paripurna memperingati HUT RI ke-80 sekaligus mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya, Bagus ditemui oleh jajaran lengkap Fraksi PKS Jatim, yakni Ketua Fraksi Lilik Hendarwati, Sekretaris Puguh Wiji Pamungkas, Bendahara Harisandi Savari, serta anggota Agus Cahyono dan Khusnul Khuluk. Menurutnya, apresiasi dari pimpinan dewan kepada Fraksi PKS karena kehadiran 100 persen merupakan bukti nyata militansi kader PKS di parlemen.



Lebih lanjut, Bagus berharap Fraksi PKS Jatim terus menjadi garda terdepan dalam menyalurkan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, mulai dari persoalan sembako, pupuk, air bersih, hingga listrik.

Ia juga menegaskan pentingnya kekompakan struktur partai untuk mewujudkan target politik ke depan. "Harapan kami, fraksi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga kuat menyuarakan kepentingan rakyat. Dengan soliditas dan militansi yang terjaga, insya Allah PKS Jatim bisa menambah jumlah kursi di pemilu mendatang," tegasnya.

Alhamdulillah, tadi saya mendengar langsung bagaimana pimpinan dewan mengapresiasi Fraksi PKS. Kehadiran mereka di sidang paripurna selalu 100 persen. Ini membuktikan komitmen kader PKS untuk hadir, bekerja, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“



FRAKSI PKS JATIM SAMPAIKAN 10 CATATAN KRITIS UNTUK P-APBD 2025: APBD HARUS PRO RAKYAT, BUKAN MEMBEBANI RAKYAT



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan 10 catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna pada Selasa (19/8/2025).

Dalam pandangan umumnya, Lilik menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka-angka keuangan, tetapi amanah rakyat yang harus kembali memberi manfaat bagi rakyat. Karena itu, Fraksi PKS menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil dalam setiap alokasi anggaran.

Dalam pandangan umum yang dibacakan, ada 10 catatan kritis Fraksi PKS Jatim terkait dengan Raperda Provinsi Jawa Timur itu. Pertama, pendapatan daerah harus realistis. PKS menilai target pendapatan tidak boleh ditetapkan terlalu tinggi sehingga berisiko tidak tercapai. Lebih jauh, PKS menolak penambahan pajak baru yang justru akan menambah beban ekonomi masyarakat.

Kedua, fasilitas keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) jangan dicabut. Menurut PKS, keringanan pajak tersebut terbukti meringankan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Ketiga, transfer dari pemerintah pusat harus dipastikan aman. Dana transfer ini menjadi sumber penting pembiayaan daerah. PKS menekankan agar Pemprov memastikan kejelasan mekanisme dan jumlahnya, sehingga tidak mengganggu program prioritas di daerah. Keempat, pendapatan lain-lain harus dikelola secara transparan. PKS meminta kejelasan sumber dan penggunaan pos ini agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Kelima, belanja daerah harus fokus pada kebutuhan rakyat. PKS menilai belanja daerah jangan dihabiskan untuk program seremonial, tetapi harus diprioritaskan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Keenam, terkait anggaran pendidikan minimal 20 persen, Fraksi PKS menekankan penggunaannya harus diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana dan prasarana, serta pengurangan angka putus sekolah. "Jangan sampai dana pendidikan habis di birokrasi, sementara mutu pembelajaran dan fasilitas sekolah masih timpang," tegas Lilik.



“APBD harus dikelola dengan prinsip amanah. Setiap rupiah yang dipungut dari rakyat, harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dasar, penguatan perlindungan sosial, serta pembangunan yang adil dan merata.”

Ketujuh, anggaran kesehatan harus diperkuat, terutama untuk menurunkan angka stunting yang masih cukup tinggi di Jawa Timur. Selain itu, layanan rumah sakit milik Pemprov harus terus berbenah, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola pelayanan.

Kedelapan, terkait program pengentasan kemiskinan, PKS menilai program yang ada masih belum efektif. Fraksi menekankan perlunya program yang tepat sasaran dan berbasis pemberdayaan, agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, bukan sekadar bergantung pada bantuan.

Kesembilan, BUMD Jawa Timur harus sehat dan produktif. PKS menilai perusahaan daerah seharusnya memberi dividen bagi APBD, bukan justru menjadi beban. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus lebih profesional dan berorientasi pada profit.

Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas anggaran wajib dijaga. PKS menegaskan perlunya keterbukaan informasi agar publik bisa ikut mengawasi penggunaan APBD, sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Lilik menegaskan, 10 catatan kritis ini adalah bentuk tanggung jawab Fraksi PKS dalam mengawal agar APBD benar-benar pro rakyat. Menurutnya, APBD bukan hanya soal teknis akuntansi, melainkan instrumen politik anggaran untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Fraksi PKS hadir untuk memastikan APBD berpihak pada rakyat, bukan membebani rakyat. Karena itu, catatan kritis ini kami sampaikan agar pemerintah provinsi lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Lilik.

Dengan catatan kritis tersebut, Fraksi PKS Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya P-APBD 2025 agar benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur, dari kota hingga pelosok desa dan pulau-pulau terluar.

FRAKSI PKS JATIM INGATKAN KENAIKAN TARGET PAJAK DAERAH JANGAN MEMBEBANI WARGA



Fraksi PKS DPRD Jawa Timur memberi catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, dalam rapat paripurna pada Selasa (19/8/2025).

Salah satu sorotan tajam disampaikan terkait kenaikan target Pajak Daerah dari Rp 12,87 triliun menjadi Rp 12,97 triliun, atau naik sebesar Rp 103 miliar. Menurut Fraksi PKS, kenaikan itu harus diwaspadai agar tidak menambah beban masyarakat Jawa Timur yang kondisinya ekonominya belum sepenuhnya pulih.

Salah satu sorotan tajam disampaikan terkait kenaikan target Pajak Daerah dari Rp 12,87 triliun menjadi Rp 12,97 triliun, atau naik sebesar Rp 103 miliar. Menurut Fraksi PKS, kenaikan itu harus diwaspadai agar tidak menambah beban masyarakat Jawa Timur yang kondisinya ekonominya belum sepenuhnya pulih.

Fraksi PKS meminta Gubernur Jawa Timur tetap mempertahankan implementasi sejumlah kebijakan keringanan pajak, seperti Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/722/KPTS/013/2024 yang memberikan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, agar masyarakat tidak semakin terbebani pungutan tambahan opsen maupun perubahan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023.

Selain itu, PKS juga mendesak agar kebijakan pembebasan pajak daerah bagi masyarakat miskin sesuai data P3KE serta pengemudi transportasi online sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100/3.3.1/435/013/2025 tetap dilanjutkan.

“Dengan demikian, kenaikan target pajak daerah harus diperoleh dari intensifikasi dan optimalisasi potensi pajak, bukan semata menaikkan beban wajib pajak. Target jangan sampai sekadar mark down yang tidak realistis,” ujar Lilik.

Fraksi PKS menegaskan bahwa keadilan fiskal harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan P-APBD 2025 agar tidak menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat Jawa Timur.

“Data penjualan kendaraan semester I/2025 mengalami penurunan -8,06 persen year on year, dengan pertumbuhan kendaraan baru merosot hingga -20 persen. Dampaknya, realisasi pajak daerah juga turun -3,86 persen. Kondisi ini harus jadi pertimbangan serius.”



Ketua Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



BUMD BANYAK YANG SAKIT, LILIK DORONG REGULASI BARU YANG PRO OTONOMI DAERAH, BUKAN INTERVENSI PUSAT

Pemerintah tengah menyiapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan diajukan ke DPR RI. Langkah ini diambil menyusul data mengejutkan: dari 1.571 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 70 persen dalam kondisi tidak sehat, meski total asetnya mencapai lebih dari Rp1.200 triliun.

Persoalan utama dinilai berasal dari buruknya tata kelola, kuatnya intervensi politik, serta penempatan manajemen yang tidak kompeten. Situasi ini memantik perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD di daerah.

Lilik Hendarwati, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang juga Ketua Fraksi PKS, menyambut positif inisiatif penyusunan RUU tersebut, namun dengan sejumlah catatan kritis.

Menurutnya, semangat utama dari regulasi ini harus berpihak pada otonomi daerah dan penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi lokal, bukan menyamaratakan kebijakan dari pusat yang justru bisa menghambat inovasi dan daya saing. "BUMD tidak bisa disamaratakan. Tiap daerah punya kekhasan. Justru BUMD harus menjadi instrumen inovasi dan penguatan ekonomi berbasis lokalitas," tambahnya.

A photograph of Lilik Hendarwati, a woman wearing a red and white patterned hijab and a red long-sleeved top. She is gesturing with her hands while speaking. The background is blurred, showing what appears to be a meeting or press conference setting.

"Saya menyambut baik rencana RUU BUMD sebagai upaya memperkuat keberadaan BUMD dalam menopang perekonomian nasional berbasis potensi lokal. Namun yang harus diwaspadai adalah potensi sentralisasi kewenangan dan intervensi pusat terhadap kebijakan ekonomi daerah."

Lilik juga mengingatkan pentingnya menjaga peran DPRD dalam proses pendirian dan pengawasan BUMD, agar tetap relevan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. "Fungsi pengawasan tidak boleh dikebiri. DPRD adalah representasi rakyat yang bertugas memastikan BUMD dijalankan dengan dasar bisnis yang sehat dan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Lilik mengusulkan agar RUU BUMD mengatur secara proporsional beberapa hal penting, antara lain, Pertama, keterlibatan aktif DPRD dalam pendirian, evaluasi, dan pengawasan BUMD. Kedua, rekrutmen direksi dan komisaris yang dilakukan secara profesional dan transparan. Ketiga, pemberian insentif bagi BUMD yang mampu berinovasi dan menjalin kolaborasi strategis. Keempat, perlindungan aset dan sumber daya daerah dari potensi penguasaan oleh kepentingan luar daerah.

Menurut Lilik, keberadaan regulasi yang tepat akan mendorong BUMD benar-benar "naik kelas" tanpa kehilangan jati diri sebagai penggerak ekonomi daerah. "Jangan sampai regulasi ini malah memperlemah BUMD dengan menyeragamkan visi pembangunan. Harus tetap berbasis otonomi yang sehat," tegasnya.

Ia berharap pembahasan RUU ini melibatkan pemangku kepentingan di daerah, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, agar substansinya tidak melenceng dari semangat reformasi dan otonomi daerah. "Kalau ingin BUMD sehat dan kuat, kuncinya ada di tata kelola yang profesional, transparan, serta berpihak pada daerah, bukan pada kepentingan politik sesaat," pungkasnya.

PEREMPUAN DI POLITIK? LILIK HENDARWATI SIAP BERBAGI INSPIRASI DI SEKOLAH POLITIK IMM

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, menerima kunjungan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Surabaya pada Jumat (8/8/2025). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan undangan resmi bagi Lilik untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Politik yang akan digelar IMM Surabaya pada 22 Agustus 2025. Acara itu mengangkat tema peran perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan.

“Mereka ingin menghadirkan sosok perempuan yang berada di dunia politik. Saya di DPRD Provinsi Jawa Timur diundang untuk berbagi pengalaman tentang peran kami di bidang legislasi, advokasi, penganggaran, dan kegiatan publik lainnya,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga keberanian mengambil peran strategis demi kepentingan publik.

“Mudah-mudahan saya bisa hadir untuk menyampaikan kepada generasi muda, khususnya adik-adik perempuan, bahwa mereka juga mampu dan layak berkiprah di dunia politik,” tambahnya. Lilik berharap Sekolah Politik IMM Surabaya dapat menjadi wadah pembelajaran yang membangun kesadaran politik di kalangan mahasiswa. “Kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan pemimpin masa depan yang visioner dan berintegritas,” tutupnya.



TEKEN KUA-PPAS 2025, LILIK HENDARWATI: SETIAP RUPIAH APBD HARUS BEKERJA UNTUK RAKYAT

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur sekaligus Anggota Komisi C, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 harus dimaknai sebagai komitmen nyata eksekutif dan legislatif untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Menurut Lilik, perubahan atau penyesuaian anggaran yang tertuang dalam KUA-PPAS tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau ajang memasukkan program yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak warga.

Lilik memerinci tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025. Pertama, memastikan APBD diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan perlindungan sosial. Kedua, menjawab tantangan aktual, mulai dari pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan UMKM, hingga mitigasi dampak perubahan iklim di daerah rawan bencana.



“Perubahan anggaran harus menjadi refleksi dari upaya serius untuk memastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk rakyat, menjawab tantangan aktual, dan mengoptimalkan kinerja belanja daerah.”

Ketiga, mengoptimalkan kinerja belanja daerah dengan indikator hasil (outcome) yang jelas, terukur, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak boleh diarahkan untuk kepentingan seremonial, elitis, atau jauh dari persoalan riil warga.

“Proses ini harus transparan, partisipatif, dan akuntabel, agar masyarakat dapat menilai bahwa APBD benar-benar menjadi alat memperbaiki taraf hidup mereka, bukan sekadar dokumen angka,” tegasnya.

Lilik menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa persetujuan KUA-PPAS 2025 merupakan bentuk tanggung jawab politik dan moral legislatif untuk memastikan Jawa Timur melangkah dengan prioritas yang tepat. “Rakyat sejahtera, layanan publik membaik, dan pembangunan berkelanjutan terjaga, itulah arah yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.





Sekretaris Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**Dr. H. Puguh Wiji
Pamungkas, MM**

KOMISI E

(KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)





SAFARI LEGISLATIF UNESA, PUGUH DPRD JATIM AJAK MAHASISWA MELEK POLITIK DAN PEKA ISU SOSIAL

Suasana berbeda tampak di ruang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur pada Kamis (31/07/2025). Puluhan mahasiswa dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (UNESA) hadir dalam agenda kunjungan bertajuk Safari Legislatif. Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Anggota Komisi E DPRD Jatim Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas. Legislator muda dari Dapil Malang Raya itu mengajak para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat peran dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara.

“Diskusi berlangsung hangat. Banyak fenomena aktual yang menjadi perhatian mereka, dari isu kemiskinan, pendidikan, hingga ketimpangan,” ujar Puguh. Menurut Puguh, kegiatan semacam ini menjadi ruang edukasi penting untuk mempererat hubungan antara parlemen dan dunia kampus. Ia menyebut, mahasiswa perlu memahami proses penyusunan peraturan daerah (Perda), sistem kerja DPRD, serta tantangan legislatif di era digital dan keterbukaan informasi.

“Diskusi semacam ini penting untuk menyehatkan kehidupan berbangsa. Saya senang adik-adik mahasiswa punya antusiasme tinggi terhadap peran politik dan pembangunan daerah,” tambahnya. Dalam sesi penutup, Puguh menyampaikan pesan inspiratif kepada peserta kunjungan. “Tetap semangat adik-adik mahasiswa! Di pundak kalianlah masa depan bangsa ditentukan, dan di tangan kalianlah kemajuan Jawa Timur diharapkan,” pungkasnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda serta mendorong lahirnya pemimpin masa depan yang kritis, peka, dan solutif terhadap permasalahan masyarakat.

DITARIK PUNGUTAN, SISWA SMAN 1 KAMPAK UNJUK RASA, PUGUH: SEKOLAH HARUSNYA TEMPAT MEMBANGUN TRUST

Puluhan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa (26/8/2025). Mereka memprotes adanya pungutan yang dinilai memberatkan, mulai dari iuran Rp65 ribu setiap bulan, tambahan Rp500 ribu setiap tiga tahun, hingga kewajiban bersedekah saat pengambilan rapor.

Bagi sebagian siswa, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, beban ini dirasa sangat berat. Mereka menilai kebijakan sekolah tidak transparan, bahkan cenderung memberatkan pihak yang seharusnya mendapatkan keringanan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyayangkan terjadinya aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya, sekolah semestinya menjadi ruang yang membangun kepercayaan (trust) antara guru, siswa, dan orang tua, bukan justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.

“Sekolah itu pabrikasi pembentukan karakter anak bangsa, selain meningkatkan intelektual siswa. Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah.”

“Sekolah itu pabrikasi pembentukan karakter anak bangsa, selain meningkatkan intelektual siswa. Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah,” tegas Puguh, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.

Ia juga menyoroti adanya isu pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa. Padahal, banyak siswa penerima KIP atau PIP yang jelas-jelas berasal dari keluarga kurang mampu.

“Yang namanya sumbangan itu tidak boleh disamaratakan. Harus berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Kalau siswa miskin ikut dipukul rata, jelas ini tidak adil,” lanjutnya.

Lebih jauh, Puguh meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemprov Jatim segera mengambil langkah serius menindaklanjuti persoalan ini. Menurutnya, fenomena pungutan sekolah bukan hanya terjadi di SMAN 1 Kampak, tapi sudah seperti fenomena gunung es di berbagai daerah.

“Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Harus ada ketegasan agar sekolah tidak menarik pungutan yang justru menambah beban masyarakat,” tegasnya.





Bendahara Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**HARISANDI SAVARI,
S.PT, ST**

KOMISI D

(PEMBANGUNAN)

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



ROKOK ILEGAL DARI BATAM ANCAM INDUSTRI LOKAL, HARISANDI: PETANI TEBBAKAU MADURA DI UJUNG TANDUK

Peredaran rokok ilegal asal Batam, Riau, di Madura menimbulkan keresahan baru bagi petani tembakau dan industri rokok lokal. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur asal Madura, Harisandi Savari, menyebut kondisi ini bisa menjadi ancaman serius bagi ribuan tenaga kerja serta petani yang selama ini menggantungkan hidup dari tembakau Madura.

“Pabrik rokok di Madura sedang tumbuh dan telah menyerap ribuan tenaga kerja. Ekonomi masyarakat mulai membaik. Tapi dengan adanya rokok Batam yang dijual murah, semua ini bisa hancur,” kata Harisandi. Menurut politisi asal daerah pemilihan Madura tersebut, beberapa merek rokok ilegal seperti San Marino dan Manchester masih beredar bebas di pasar lokal. Produk ilegal ini, tegasnya, tidak memberi kontribusi apa pun bagi masyarakat Madura.

“Bahan bakunya belum tentu dari tembakau Madura, buruhnya bukan orang Madura, dan hasilnya juga tidak masuk ke perekonomian daerah.



Hanya segelintir pihak saja yang diuntungkan. Sementara petani tembakau kita jelas-jelas di ujung tanduk,” tegas Harisandi yang juga menjabat Ketua Kadin Pamekasan. Ia mengingatkan, jika distribusi rokok lokal terganggu, otomatis kebutuhan tembakau akan berkurang, sehingga akan ada pengurangan buruh pabrik secara besar-besaran. “Ini praktik simbiosis parasitisme yang berbahaya. Kalau tidak segera dihentikan, perekonomian Madura bisa terpuruk,” ujarnya.

Lebih jauh, Harisandi menyoroti bahwa dampak negatif peredaran rokok ilegal bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga pada penerimaan negara. Pada 2024, Madura tercatat menyumbang Rp 1,3 triliun dari cukai tembakau dan rokok.

“Kalau pasar rokok lokal diganggu rokok ilegal dari Batam, pendapatan negara juga pasti tergerus. Negara harus hadir, Bea Cukai harus turun tangan,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Megatruh Yoga Brata, Pejabat Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Madura, mengakui bahwa peredaran rokok ilegal dari luar memang mulai muncul di Madura. “Kami berusaha untuk menghentikan peredarannya,” ujarnya singkat.

Harisandi berharap pemerintah bergerak cepat agar industri rokok lokal tidak runtuh. “Jangan biarkan petani dan buruh rokok kita jadi korban. Ini menyangkut masa depan ekonomi Madura,” pungkasnya.

Kalau pasar rokok lokal diganggu rokok ilegal dari Batam, pendapatan negara juga pasti tergerus. Negara harus hadir, Bea Cukai harus turun tangan, tegasnya.



Lonjakan kasus campak di Kabupaten Sumenep, Madura, sudah menjadi perbincangan. Lebih dari 2.000 anak terjangkit, 17 meninggal dunia, dan penyebaran meluas ke 26 kecamatan. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKS dari Dapil Madura, Harisandi Savari, menilai rendahnya cakupan imunisasi menjadi penyebab utama, selain dampak pandemi COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merespons cepat melalui imunisasi massal Outbreak Response Immunization (ORI) yang dimulai sejak 25 Agustus, menargetkan anak usia 9 bulan–6 tahun. Program ini diperkuat dengan distribusi vaksin MR serta dukungan lintas sektor.

“Kami tentu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang sudah meninjau langsung dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, perguruan tinggi, hingga Posyandu. Pendekatan ini penting untuk memperluas jangkauan imunisasi dan edukasi,”

kata Harisandi. Namun, menurutnya masih ada hambatan serius di lapangan. Sebagian masyarakat Sumenep masih meragukan vaksin karena khawatir mengandung bahan yang haram. Padahal, isu ini sudah dibahas para ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).



**HARISANDI DPRD
JATIM: ANGGAPAN
HARAM VAKSIN JADI
HAMBATAN,
PEMPROV HARUS
LIBATKAN ULAMA
UNTUK EDUKASI
MASYARAKAT
MADURA**

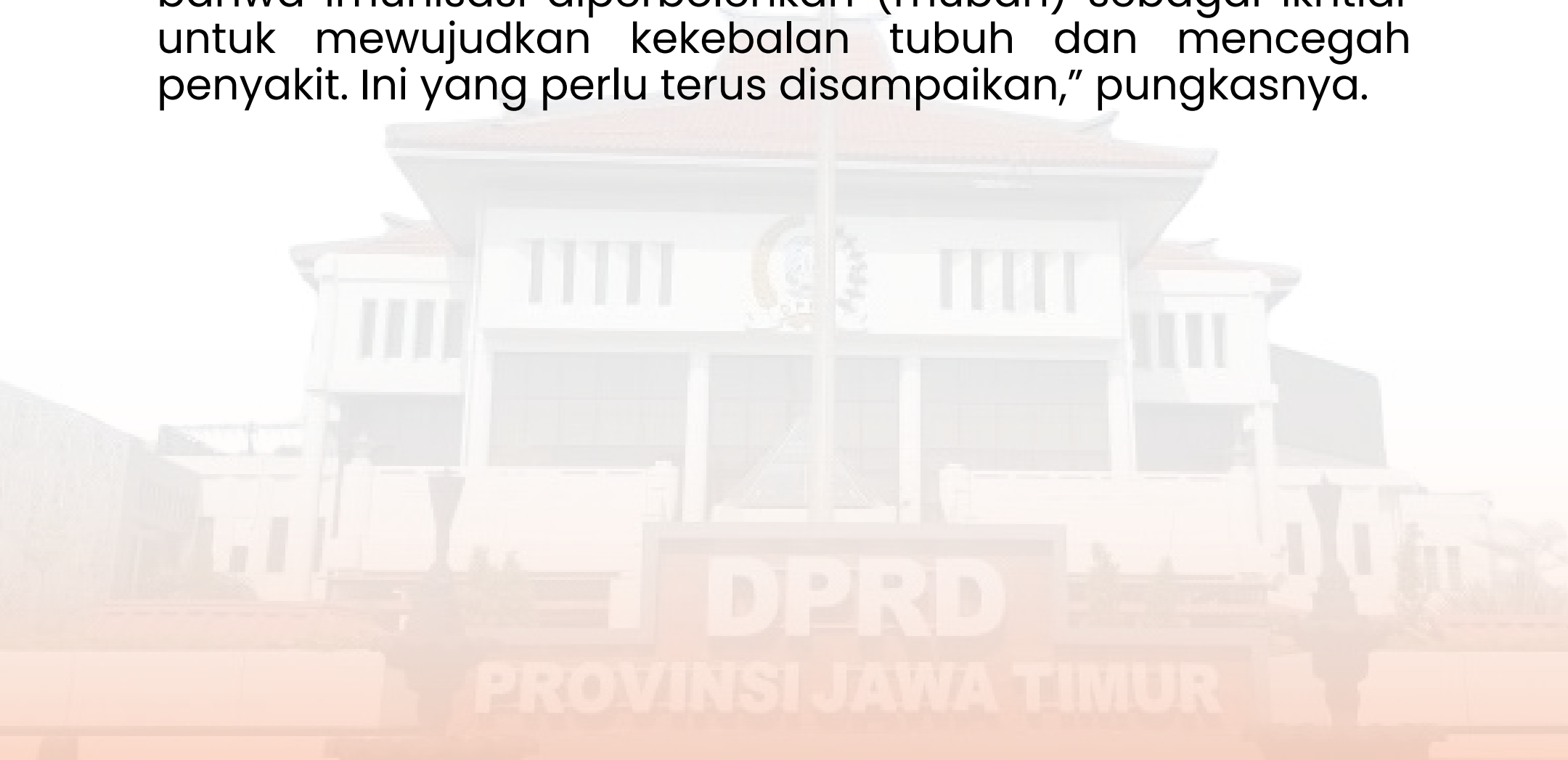
“Ini hanya masalah miskomunikasi. Dalam Islam, menjaga jiwa adalah tujuan utama syariat. Obat dan vaksin yang menyelamatkan nyawa justru dianjurkan, bahkan wajib, bila tidak ada alternatif lain.”



Harisandi mendorong Pemprov Jatim untuk mengedepankan transparansi medis dan menggandeng ulama dalam sosialisasi vaksin. Menurutnya, pihak medis perlu menjelaskan kandungan dan proses pembuatan vaksin dengan bahasa sederhana, disertai bukti hasil uji klinis.

Selain itu, Pemprov juga bisa bekerja sama dengan MUI maupun ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberikan kepastian hukum syariat kepada masyarakat.

“Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 sudah jelas menyatakan bahwa imunisasi diperbolehkan (mubah) sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Ini yang perlu terus disampaikan,” pungkasnya.





Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**H AGUS CAHYONO,
SHI, MHI**

**KOMISI A
(PEMERINTAHAN)**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)**



Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kabupaten Trenggalek mendapatkan dukungan penuh dari anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi itu menyebut proyek ini sebagai langkah strategis yang menguntungkan secara lingkungan maupun ekonomi bagi daerah.

“Terkait rencana pembangunan PLTSA di Kabupaten Trenggalek, saya mendukung 100%. Kita juga berharap para tokoh dan masyarakat Trenggalek ikut mendukung program ini karena banyak manfaat yang bisa dinikmati,” ujar Agus, yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Jatim.

Menurut Agus, keberadaan PLTSA tidak hanya menyelesaikan persoalan limbah sampah, tetapi juga membuka peluang kerja yang signifikan. “Yang pertama, soal problem sampah bisa terselesaikan. Kedua, pembangkit ini akan menyedot tenaga kerja dan membantu mengurangi angka pengangguran serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan,” paparnya.



**PLTSA AKAN DIBANGUN
DI TRENGGALEK, AGUS
CAH: SOLUSI SAMPAH,
TENAGA KERJA, DAN
PAD**

Lebih jauh, Agus menambahkan bahwa pembangunan PLTSA juga akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek. “Otomatis ini akan menambah PAD yang nantinya dinikmati kembali oleh masyarakat,” imbuhnya.

Proyek ini diketahui merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah Trenggalek dan pihak swasta. Agus optimis pelaksanaan proyek akan berjalan baik mengingat pihak swasta sudah melakukan perencanaan dan kalkulasi secara matang.

“Pihak swasta tentu sudah menghitung dengan cermat aspek keuntungan, dampak, hingga potensi masalahnya. Karena itu saya yakin, proyek ini akan berjalan optimal,” jelasnya. Agus juga menepis kekhawatiran warga soal dampak lingkungan. Ia memastikan, berdasarkan informasi yang ia terima, teknologi pengolahan sampah yang akan digunakan berbasis kimia dan diklaim ramah lingkungan. Selain itu, lokasi pembangunan PLTSA juga relatif jauh dari pemukiman warga.

“Jadi ini aman bagi masyarakat sekitar dan secara teknologi sudah dirancang agar tidak menimbulkan pencemaran,” tutupnya. Dukungan dari DPRD Jatim ini diharapkan memperkuat semangat kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan proyek PLTSA, sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah modern dan pembangunan berkelanjutan di Trenggalek.

A man with a beard and mustache, wearing a colorful batik shirt, is smiling and speaking into a black microphone. He is sitting at a wooden table with some papers and a small box in front of him. The background is a light-colored wall with a faint silhouette of a traditional Javanese building.

“Ini hanya masalah miskomunikasi. Dalam Islam, menjaga jiwa adalah tujuan utama syariat. Obat dan vaksin yang menyelamatkan nyawa justru dianjurkan, bahkan wajib, bila tidak ada alternatif lain.”



BELAJAR DARI KASUS PATI, AGUS CAH: KOMISI A DPRD JATIM MINTA BINDA DETEKSI DINI GEJOLAK DAERAH

Belajar dari kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berujung pada hak angket hingga pemakzulan bupati karena polemik kenaikan pajak dan retribusi, Komisi A DPRD Jawa Timur meminta Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jatim untuk memperkuat deteksi dini potensi gejolak serupa di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menegaskan bahwa peristiwa di Pati menjadi peringatan penting bagi daerah lain, termasuk Jawa Timur. "Kenaikan pajak dan retribusi yang mencapai ratusan persen bisa memicu kegaduhan dan ketidakstabilan. Ini yang harus kita antisipasi bersama," ujar Agus Cah usai kunjungan silaturahmi ke BINDA Jatim, Selasa (19/8/2025). Agus menekankan, deteksi dini sangat krusial agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

"Kami berharap BINDA Jatim bisa menjadi garda terdepan dalam membaca potensi persoalan di masyarakat sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sejak awal," imbuhnya. Dalam kunjungan itu, Komisi A juga membahas sinergi di bidang pemerintahan, politik, keamanan, serta memperkuat kerja sama di bidang informasi sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Selain itu, DPRD Jatim turut meminta masukan BINDA terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Trantib lainnya.

"Masukan dari BINDA akan memperkaya data dan perspektif yang kami butuhkan dalam mengawal perubahan perda. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di Jawa Timur," tegas Agus. Menurutnya, Jawa Timur sebagai barometer politik nasional harus tetap kondusif. "Kalau Jatim stabil, maka stabilitas nasional ikut terjaga. Karena itu sinergi DPRD dan BIN menjadi kebutuhan mendesak," pungkasnya.



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**DRS. H. M KHUSNUL
KHULUK**

KOMISI B

(PEREKONOMIAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

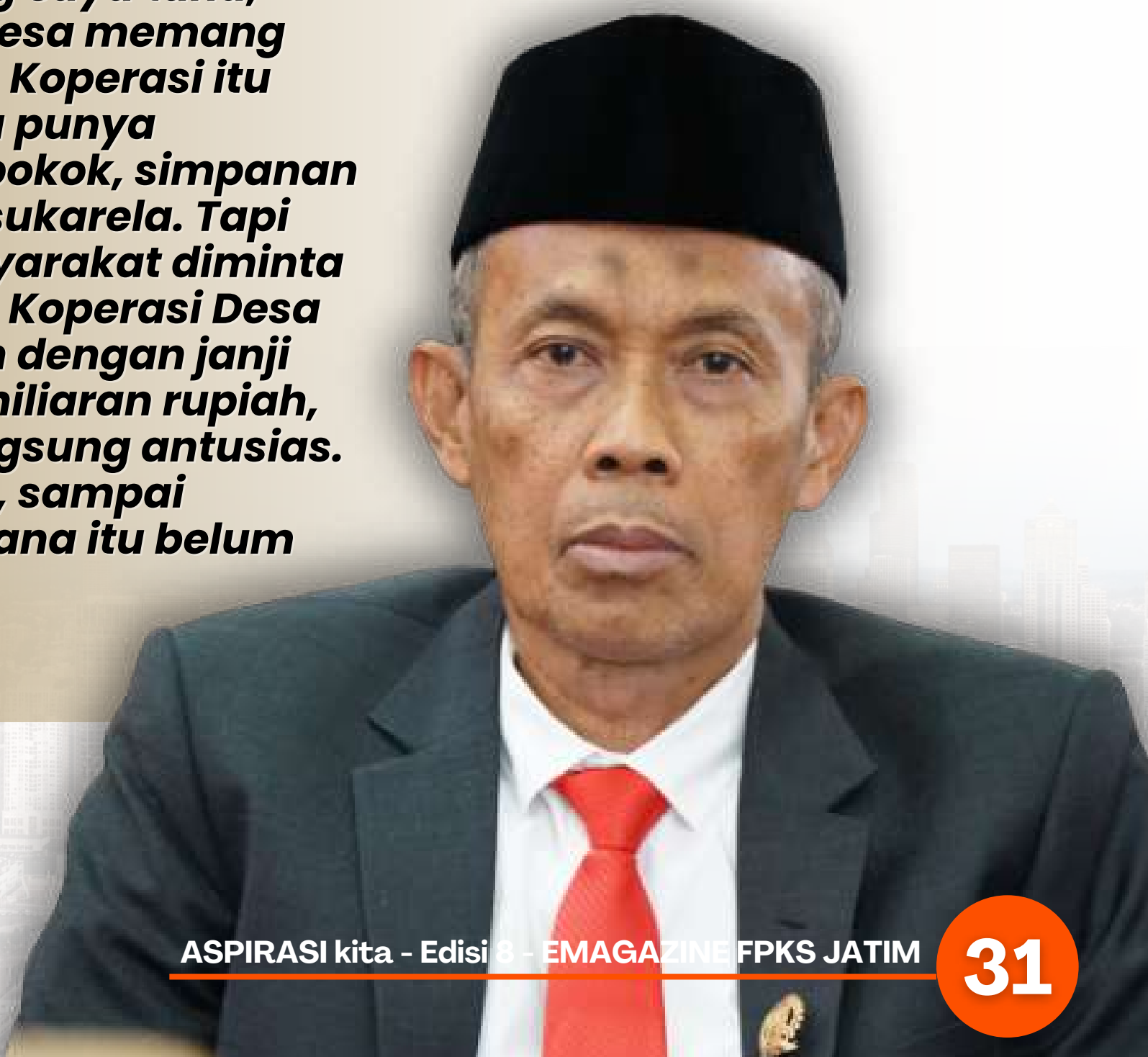


BANYAK DESA BELUM SIAP JALANKAN KOPERASI MERAH PUTIH, KHUSNUL KHULUK MINTA PEMERINTAH PERBANYAK BIMBINGAN TEKNIS

Program Koperasi Merah Putih yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa di Jawa Timur masih menghadapi kendala. Banyak koperasi yang dibentuk belum berjalan optimal karena desa dinilai belum siap, baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan pengurus.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, mengungkapkan bahwa dari hasil kunjungannya di sejumlah daerah seperti Sampang dan Lumajang, hanya koperasi yang sebelumnya sudah eksis yang mampu beroperasi. Sementara koperasi baru yang dibentuk khusus untuk program ini mengalami hambatan modal dan belum memulai kegiatan usaha.

“Kalau yang saya tahu, beberapa desa memang belum siap. Koperasi itu seharusnya punya simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela. Tapi ketika masyarakat diminta mendirikan Koperasi Desa Merah Putih dengan janji pinjaman miliaran rupiah, mereka langsung antusias. Sayangnya, sampai sekarang dana itu belum ada.”



Khusnul juga menyoroti adanya kepala desa yang enggan mengajukan pinjaman karena khawatir risiko gagal bayar akan berdampak pada elektabilitas mereka di pemilihan berikutnya.

Untuk mengatasi hambatan ini, Khusnul mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bagi pengurus koperasi, serta melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan manajemen dan penguatan usaha.

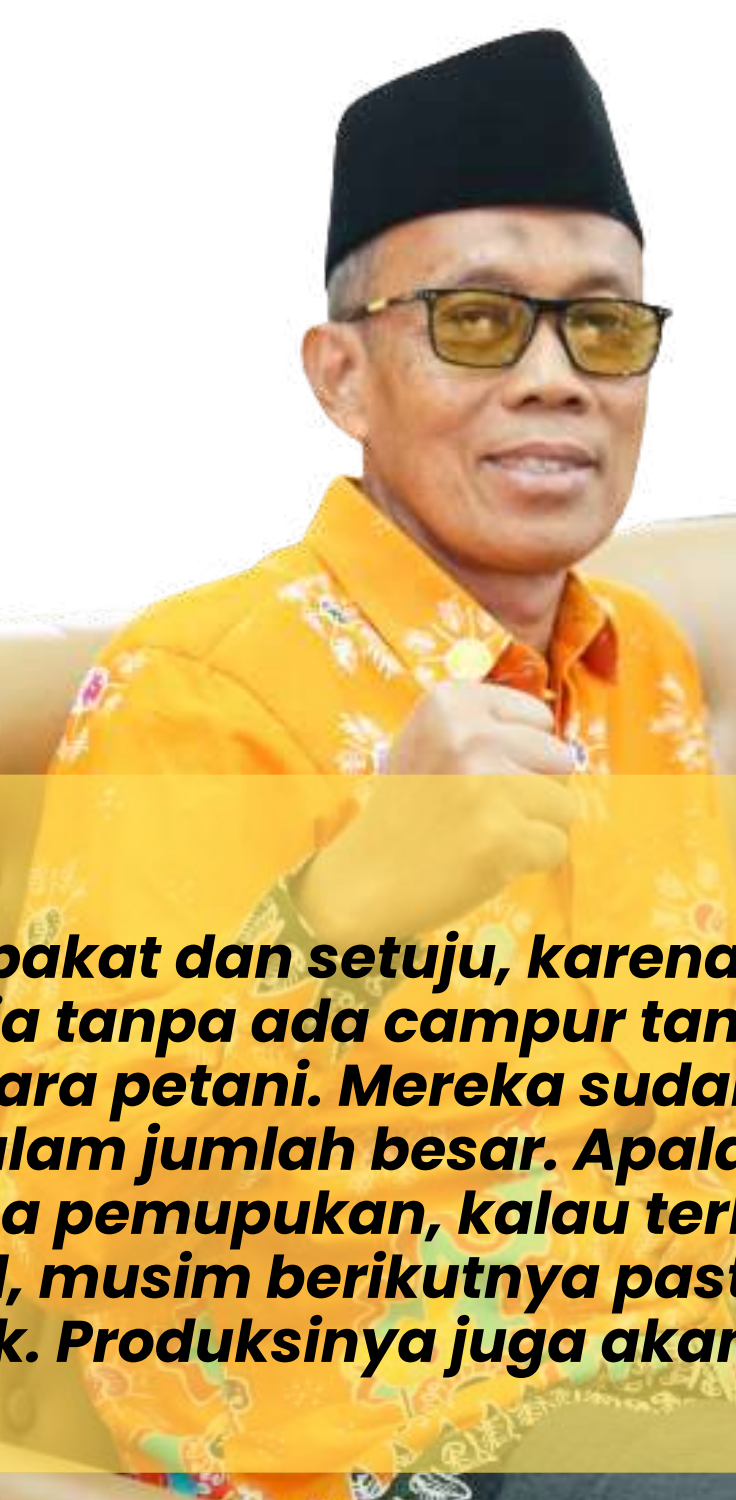
“Kalau tidak dimulai dari usaha kecil, dana besar dari imbara itu tidak mungkin turun. Maka pemerintah harus turun tangan secara aktif, bukan sekadar membentuk koperasi lalu menunggu dana masuk,” tegasnya.



APRESIASI KEBIJAKAN SERAP GULA PETANI, KHUSNUL KHULUK: JANGAN TUNDA PEMBAYARAN KE PETANI

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, menyambut baik langkah pemerintah yang menyiapkan kebijakan baru untuk mengatasi persoalan tidak lakunya gula hasil panen petani tebu. Salah satu keputusan penting adalah kesediaan Danantara melalui beberapa perusahaan BUMN untuk menyerap gula dari petani. Menurut Khusnul, langkah cepat pemerintah sangat penting agar petani tidak semakin terpuruk.

Jika dibiarkan, para petani yang sudah terjerat utang akan kesulitan untuk melanjutkan produksi pada musim berikutnya. "Saya sepakat dan setuju, karena kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan pemerintah, kasihan para petani. Mereka sudah hutang ke sana kemari dalam jumlah besar. Apalagi saat ini sudah mulai masa pemupukan, kalau terlambat ditangani dari awal, musim berikutnya pasti akan semakin rusak. Produksinya juga akan menurun," tegas Khusnul di Surabaya, Senin (25/8/2025).

A photograph of Khusnul Khuluk, a man wearing a black cap and glasses, sitting on a yellow sofa. He is wearing a yellow batik shirt and has his hands clasped in front of him. The background is a plain white wall.

"Saya sepakat dan setuju, karena kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan pemerintah, kasihan para petani. Mereka sudah hutang ke sana kemari dalam jumlah besar. Apalagi saat ini sudah mulai masa pemupukan, kalau terlambat ditangani dari awal, musim berikutnya pasti akan semakin rusak. Produksinya juga akan menurun."

Ia menilai keputusan pemerintah, khususnya dengan keterlibatan Danantara dan BUMN, sudah berada di jalur yang benar. Namun, ia mengingatkan agar pembayaran hasil serapan gula ke petani tidak molor.

“Tebu yang diambil alih dan dibeli oleh Danantara ini saya rasa sudah bagus. Tinggal bagaimana pabrik gula segera mencairkan uang ke petani. Jangan sampai mereka menunggu berpekan-pekan bahkan berbulan-bulan,” ujarnya.

Khusnul menekankan, percepatan pembayaran sangat krusial karena petani membutuhkan modal segera untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya. Tanpa dukungan itu, produktivitas tebu di Jawa Timur dikhawatirkan akan terus menurun.

“Kalau uang dari hasil panen cair cepat, petani bisa langsung melanjutkan perawatan lahannya. Itu yang akan membuat produksi tebu tetap stabil dan kualitasnya terjaga,” pungkasnya.



FRAKSI PKS JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)